

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kesatuan Bangsa dan Politik

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

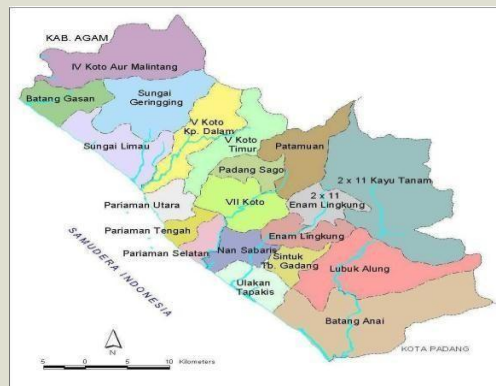
Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



L K j I P 2025 KESBANGPOL



**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja OPD 2025 dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2030 hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua aparatur di OPD baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga laporan akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Parit Malintang, 09 Maret 2026
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


LOUIS MAIREZAL, S.Sos., M.Si
NIP. 198905061993082001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TEBEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2
1.2 Permasalahan Utama	6
1.3 Sistematika Pelaporan	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 VISI DAN MISI	15
2.1.1. Visi	15
2.1.2. Misi	15
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	16
2.2 STARREGI DAN ARAH KEBIJAKAN	18
2.2.1. Strategi Kesbangpol	18
2.2.2. Arah Kebijakan	19
2.3 Perjanjian Kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Pencapaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	22
3.1.1. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026.....	24
3.1.2. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	41
3.2 Realisasi Anggaran	80
BAB IV. PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Langkah Kedepan	84

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Daftar Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Padang Pariaman	5
2.	Tabel 1.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Padang Pariaman	10
3.	Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Strategis Dalam Rpjmd 2021-2026 Dan Rpjmd 2025-2029	17
4.	Tabel 2.2	Rencana Kerja Kesbangpol Dan Target Tahunan 2025	19
5.	Tabel 3.1	Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2025 Dengan Renstra 2021 2026	22
6.	Tabel 3.2	Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2025 Dengan Renstra 2021 Sd 2026	23
7.	Tabel 3.3	Potensi Konflik Di Padang Pariaman	24
8.	Tabel.3.4	Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penanganan Konflik Sosial Di Daerah	25
9.	Tabel.3.5	Perbandingan Target Dan Capaian Indikator Kinerja Konflik Sosial	26
10.	Tabel.3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Tahun 2025	29
11.	Tabel.3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Kantor	34
12.	Tabel.3.8	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Penanganan Konflik Sosial di Daerah	35
13.	Tabel.3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	38
14.	Tabel.3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025	41
15.	Tabel.3.11	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	41
16.	Tabel.3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	45
17.	Tabel.3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025	48
18.	Tabel.3.14	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	48
19.	Tabel.3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	52
20.	Tabel.3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Penurunan Jumlah Konflik	55
21.	Tabel.3.17	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	5
22.	Tabel.3.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	59
23.	Tabel 3.19	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025	61
24.	Tabel 3.20	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Persentase Potensi Konflik Kewaspadaan Dini yang tertangani	62
25.	Tabel 3.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	64
26.	Tabel 3.22	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025	66
27.	Tabel 3.23	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	66
28.	Tabel 3.24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	70
29.	Tabel 3.25	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Kantor	72
31.	Tabel 3.26	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Penanganan Konflik Sosial di Daerah	73
32.	Tabel 3.27	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	76
33.	Tabel 3.28	Perbandingan Target Realisasi Knerja Jangka Menengah dalam Renstra 2021-2026	78
34.	Tabel 3.29	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah dalam Renstra 2025-2029	79
35.	Tabel 3.30	Realisasi Kegiatan Anggaran Tahun 2025	80

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang

Pariaman mengemban misi Bupati yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Berkeadilan, Demokratis melalui pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas dapat dilihat dari Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

A. GAMBARAN UMUM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, mulai 1 Januari 2012 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpol dan Linnmas) berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kemudian Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 20

Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh kepala kantor dan beralamat di Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, paragraf 2 pasal 28 ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas :

**MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

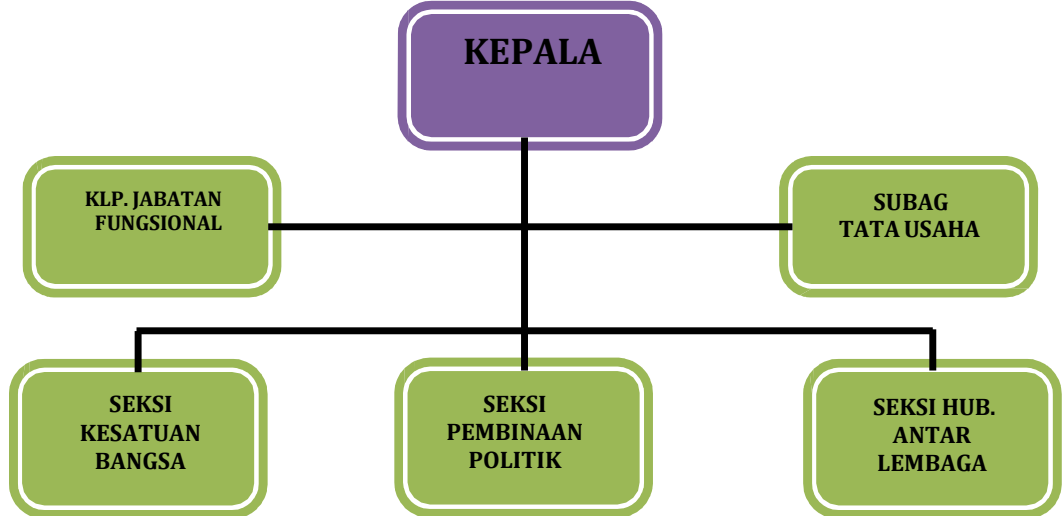
Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

A.1 STRUKTUR ORGANISASI

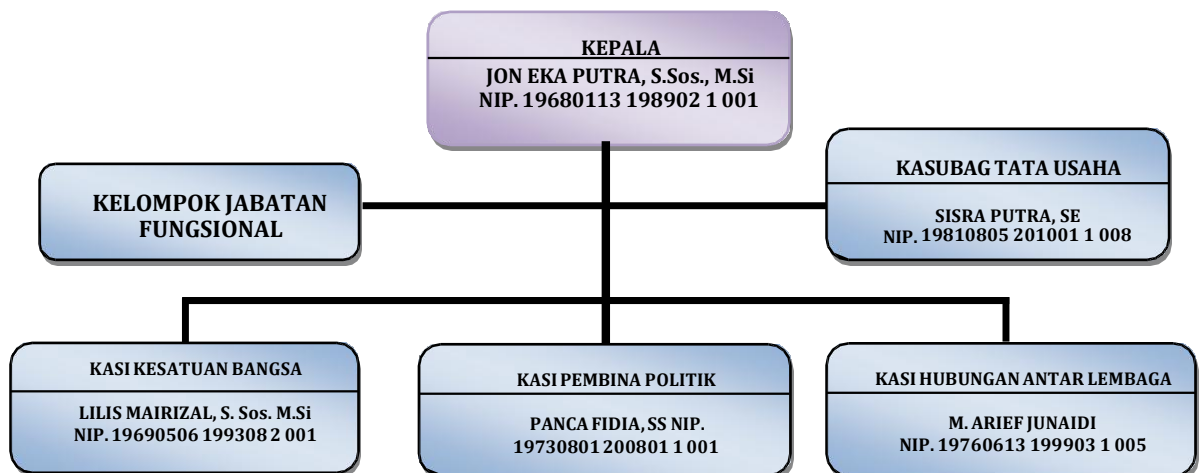
Gambar : 1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Gambar : 2

PEJABAT STRUKTURAL ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN



A.2 URAIAN TUGAS DAN DASAR HUKUMNYA

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2012, Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

A. KEPALA KANTOR

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik menetapkan program kerja kantor dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor.
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kantor sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian daerah.
4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian daerah.
5. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, fungsi dan pengadaan, mutasi kepegawaian, data dan pengembangan pegawai, disiplin dan pembenahan.

6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan kantor.
7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Kantor serta pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan diklat pimpinan diklat teknis.
8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kepegawaian daerah.
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

A.3 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI INSTANSI

Pejabat dan Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pegawai Struktural dan Fungsional yang berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu oleh 10 (sepuluh) orang Tenaga Swakelola, dengan rincian nama sebagai berikut :

Tabel. 1.1
DAFTAR PEGAWAI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	N A M A	N I P	GOL	ESELON	J A B A T A N	PDD K
1	JON EKA PUTRA, S.Sos., M.Si	19680113 198902 1 001	IV/b	III/a	Kepala Kantor	S.2
2	SISRA PUTRA, SE	19810805 201001 1 008	III/b	IV/a	Kasubag Tata Usaha	S.1
3	LILIS MAIRIZAL, S.Sos. M.Si	19690506 199308 2 001	IV/a	IV/a	Kasi Kesatuan Bangsa	S.2
4	PANCA FIDIA, SS	19730801 200801 1 001	III/d	IV/a	Kasi Pembinaan Politik	S.1
5	M. ARIEF JUNAIDI, SKM	19760613 199903 1 005	III/d	IV/a	Kasi Hubungan Antar Lembaga	S.1
6	ANDRE ASHARI, S.IP	19861108 201406 2 002	III/a	-	Analisis Wawasan Kebangsaan	S.1
7	SRI WAHYUNI, SE	19900526 201503 2 002	III/a	-	Bendahara	S.1
8	ERFINA YENTI	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA
9	YOLA SISKANANDA,	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA

10	SANTA SAPUTRA RAMAYANSAH	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA
11	METRALIADI, S.Ak	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
12	TRI MURTI, SH	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
13	NICO PRATAMA PUTRA, SH	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
14	SYELFI SULPIKA RAHMI, SH	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
15	MURNI	-	-	-	Tenaga Swakelola (Kebersihan)	SMA

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

Identifikasi permasalahan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya :

1) Hambatan Internal

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan OPD lainnya
4. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

2) Hambatan Eksternal

1. Aspek kelembagaan :

1. Dengan keluarnya UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Kesbangpol hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman belum terukur secara jelas.

2. Karena tugas dan fungsi lembaga kesatuan bangsa dan politik tidak terkait secara langsung dengan visi dan misi kepala daerah sehingga kesulitan dalam penganggaran karena tidak termasuk dalam program prioritas pembangunan.
 3. Belum maksimalnya tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Komunitas Intelijen Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Aspek politik :
- Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
 - Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
 - Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis
 - Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.
3. Aspek Sosial
1. Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi
 2. Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan.
 3. Kurangnya program-program pembinaan karakter bangsa
 4. Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
 5. Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.

4. Aspek Ekonomi :

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
6. Masih kurangnya sinergitas antara aparaturnya dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)

5. Aspek Keamanan dan Ketentraman :

1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
2. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
3. Belum sinergisnya aparaturnya dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.
4. Belum berperan aktifnya aparaturnya, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
5. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pembinaan wawasan kebangsaan, di antaranya adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat	Sedang	Peraturan perundangan, perbup	1. Intensitas Pembinaan Wasbang 2. Cakupan peserta pembinaan Wasbang 3. Kompetensi narasumber 4. Koordinasi antar instansi terkait	1. Jurang pemisah antara Masyarakat mampu & tak mampu 2. Munculnya sifat individualis dalam Masyarakat 3. Kehidupan yg makin berat & kompleks 4. Tingkat pendidikan masyarakat	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara Pada sebagian kelompok masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dlm berpolitik	Sedang	Peraturan perundangan, perbup	1. Intensitas Pembinaan pada masyarakat dan Parpol 2. Sosialisasi Peraturan perundangan pada masyarakat & anggota parpol 3. Fasilitasi pada partai politik	1. Kondisi politik yg menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik 2. Sikap apatis Masyarakat 3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan Hak politiknya	Masih terjadinya fluktuasi partisipasi masyarakat dalam politik
Pemahaman ketahanan Bangsa	Sedang	Peraturan perundangan	1. Koordinasi antar instan-	1. Kemajuan teknologi in-	Masih kurangnya pembinaan keta-

dan bela Negara Masyarakat		an, Perbup	si terkait 2. Intensitas Pembinaan bela negara 3. Cakupan peserta pembinaan bela Negara 4. Kompetensi narasumber	formasi su- Dah sampai ke daerah 2. Efek globalisasi yang sulit dibendung 3. Tingkat pemahaman Masyarakat 4. Munculnya berbagai ormas / LSM	hanan nasional & bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan & organisasi lembaga swadaya masyarakat
Pemahaman Masyarakat terhadap bahaya narkoba dan miras		Peraturan Perundangan, Perbup	1. Koordinasi antar instansi terkait 2. intensitas penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan 3. Cakupan peserta penyuluhan bahaya narkoba 4. Kompetensi Narasumber	1. Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba 2. sikap apatis masyarakat terhadap peredaran narkoba 3. kemajuan teknologi sehingga timbulnya modus baru dalam peredaran narkoba 4. efek globalisasi yang sulit dibendung	Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat

,Permasalahan pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
2. Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
3. Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.

4. Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.
4. Mengadakan Pembinaan, Penyuluhan dan sosialisasi serta kampanye kepada elemen masyarakat tentang bahaya narkoba

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Menyajikan capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

2.1.1. VISI

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 adalah **"Padang Pariaman Maju dan Sejahtera"**. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

- | | | |
|--------|---|--|
| Misi 1 | : | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas |
| Misi 2 | : | Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
| Misi 3 | : | Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata |
| Misi 4 | : | Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan |
| Misi 5 | : | Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya |

2.1.2 MISI

Dalam misi RPJMD tersebut Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam **Misi 5 (lima)** yaitu **Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya** dan Misi 1 (satu) yaitu **Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas**.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan uraian diatas, dan masa transisi dalam RPJM 2021-2026 dan RPJMD 2025-2030 dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman adalah seperti tabel di bawah ini :

TABEL 2.1
 Hubungan Misi Visi Tujuan dan Sasaran
 Berdasarkan Renstra 2021-2026

Visi : Padang Pariaman Berjaya (Unggul berkelanjutan, Relejius, sejahtera dan Berbudaya)

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	1. Meningkatnya Ketertiban Umum / Stabilitas Keamanan 2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Kantor

TABEL 2.2
 Hubungan Misi Visi Tujuan dan Sasaran
 Berdasarkan Renstra 2025-2029

Visi : Padang Pariaman yang Maju dan Sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Meningkatnya keamanan dan stabilitas masyarakat dengan indikator tujuan Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Ketahanan Nasional, dan Kualitas Kehidupan Demokrasi
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Meningkatnya Kapasitas dan kemandirian Organisasi Masyarakat
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.2.1 Strategi Kesbangpol

Strategi Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Strategi jangka menengah Kantor Kesbangpol menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol.

Strategi merupakan salah satu rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.2.2 Indikator Kinerja Utama

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman serta peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program dari Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Pada masa transisi RPJMD serta Visi dan Misi pada Kab. Padang Pariaman Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ada Perubahan Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggungjawab untuk dijalankan sesuai dengan Indkator Kinerja Utama Kesbangpol. Dibawah ini adalah Tabel 2.3 Merupakan IKU berdasarkan resntra 2021-2026 dan Tabel 2.4 IKU berdasarkan renstra 2025-2029.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Kinerja	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Ketertiban Umum / Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Ketertiban Umum / Stabilitas Keamanan	Persentase Penurunan Konflik Sosial Masyarakat	80%	83%	85%	90%	95%	100%
2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Kantor	Opini BPK	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM tertangani	Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Ketahanan Nasional, dan Kualitas Kehidupan Demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	85	87	88	90	92
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	85	87	88	90	92
		Persentase penurunan jumlah konflik	80	78	75	73	72
		Persentase potensi Konflik kewaspadaan dini yang tertangani	92	94	95	97	98
Meningkatnya keamanan dan stabilitas masyarakat	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Organisasi Masyarakat	Persentase Pembinaan ormas/LSM	91	93	94	95	96
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	77.70	78.00	78.50	79.00	79.50

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Kantor	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	80.01
2.	Meningkatnya Ketertiban Umum / Stabilitas Keamanan	Persentase Penurunan Konflik Sosial Masyarakat	100%

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1.	Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Ketahanan Nasional, dan Kualitas Kehidupan Demokrasi	1. Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan 2. Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik 3. Persentase penurunan jumlah Konflik 4. Persentase potensi konflik kewaspadaan dini yang tertangani	85% 85% 80% 92%
2.	Meningkatnya Kapasitas dan kemandirian Organisasi Masyarakat	Persentase Pembinaan terhadap ormas/LSM	91%
3.	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.70

AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Kantor	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	%	BB	BB	100%	Berhasil
2.	Meningkatnya Ketertiban Umum / Stabilitas Keamanan	Persentase Penurunan Konflik Sosial Masyarakat	%	100%	100%	100%	Berhasil

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025 sd 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Ketahanan Nasional, dan Kualitas Kehidupan Demokrasi	1. Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan 2. Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik 3. Persentase penurunan jumlah Konflik 4. Persentase potensi konflik kewaspadaan dini yang tertangani	% % % %	85% 85% 80% 92%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil
2.	Meningkatnya Kapasitas dan kemandirian Organisasi	Persentase Pembinaan terhadap ormas/LSM	%	91%	100%	100%	Berhasil
3.	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,70	77,70	100%	Berhasil

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Padang yaitu Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, yang mana tujuannya untuk Meningkatkan Ketertiban Umum / Stabilitas Keamanan, dengan sasaran dan indicator Persentase penanganan konflik sosial di daerah Kab. Padang Pariaman kami telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025.

3.1.1. Realisasi Kinerja Sasaran Startegis Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

	Sasaran Pertama : Meningkatnya Ketertiban Umum / Stabilitas Kemanan
---	--

Berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh Kami sebagai Pengampu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Indikator Sasaran Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah adalah melakukan koordinasi dengan stekholder yang terlibat dalam penanganan konflik social tersebut.dibawah ini adalah table Potensi Penanganan Konflik Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dari potensi koflik di atas pemerintah telah berusaha meredam dengan berbagai upaya untuk meredam potensi konflik tersebut dibawah ini :

Tabel 3.3
Potensi Konflik di Padang Pariaman

NO	Objek Potensi Konflik	Latar Belakang/ Kronologi Konflik	Pihak yang di Konflik	Lokasi	Jenis Konflik	Tindakanjut/ Upaya Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konflik Lahan Tarok City (eks HGU PT. Purna Karya	Masyarakat menuntut kejelasan ganti rugi tanaman dan bangunan yang terdampak sejak 2016	Masyarakat dengan Pemerintah Daerah	Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Kayutanam	Sumber Daya Alam (SDA) /Lahan	Pemerintah melakukan audiensi dengan warga Kapalo Hilalang untuk mengevaluasi SK peruntukan lahan dan memastikan transparansi pembayaran ganti rugi agar pembangunan infrastruktur (seperti kawasan pendidikan dan kesehatan) tetap berjalan tanpa merugikan warga	Lanjutan Tahun Sebelumnya
2	Proses Pengadaan Tanah Jalan Tol	Status Tanah Ulayat dan Kepemilikan, Sengketa Nilai Ganti Rugi, Persoalan Administrasi dan Tumpang Tindih Klaim Dampak Sosial dan Geografis (Fragmentasi Lahan) Komunikasi dan sosila yang kurang menyetuh Belum Selesai	Masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan Dengan Perusahaan pelaksana pembangunan jalan Tol	Kec. 2x11 Kayu Tanam	Sumber Daya Alam (SDA) /Lahan	Pemerintah melakukan audiensi dengan warga Kec. 2x11 Kayutanam untuk mengevaluasi SK peruntukan lahan dan memastikan transparansi pembayaran ganti rugi agar pembangunan Tol dapat dilanjutkan	Lanjutan Tahun sebelumnya

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Penanganan
Konflik Sosial di Daerah

Tabel Indikator Renstra 2021-2026:

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Persentase Penurunan konflik sosial Masyarakat	100%	100%	100	Berhasil

Untuk mencapai kinerja "Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah", Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Program/Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut, yaitu:

- Program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 1. dengan Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. . Jumlah anggaran Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah adalah sebesar Rp. 14.672.000,00 dan dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 14.550.000,00 persentase capaian sebesar 99,17%. Sub Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :
 - ✓ Koordinasi ke Kantor Imigrasi dan Depnaker Sumbar tentang Keberdaan Orang Asing
 - ✓ Koordinasi dengan Kapolres Padang Pariaman terkait Konflik Sosial
 - ✓ Koordinasi dengan OPD yang terkait Konflik Sosial
 - ✓ Koordinasi dengan Nagari Nagari terkait Konflik Sosial dan Keberadaan Orang Asing

- ✓ Pemantuan Keberadaan Orang Asing di Kabupaten Padang Pariaman

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Kegiatan ini adalah FGD untuk memfasilitasi komunikasi pimpinan untuk membahas masalah masalah 30okum30 terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan untuk mencari solusi serta penyelesaian yang tepat. Kegiatan ini di Anggarkan sebesar Rp. 320.756.000,00 yang terealisasi sebesar 237.638.000,00 atau 74.09% yang dilaksanakan sebanyak 9 kali pertemuan yang di ikuti oleh : Bupati Padang Pariaman, Kapolres Padang Pariaman, Dandim Pariaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman dan Sekretaris Daerah Padang Pariaman

b) Perbandingan Realisasi Capaian KInerja Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.5.

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja
berdasarkan Renstra 2021-2026

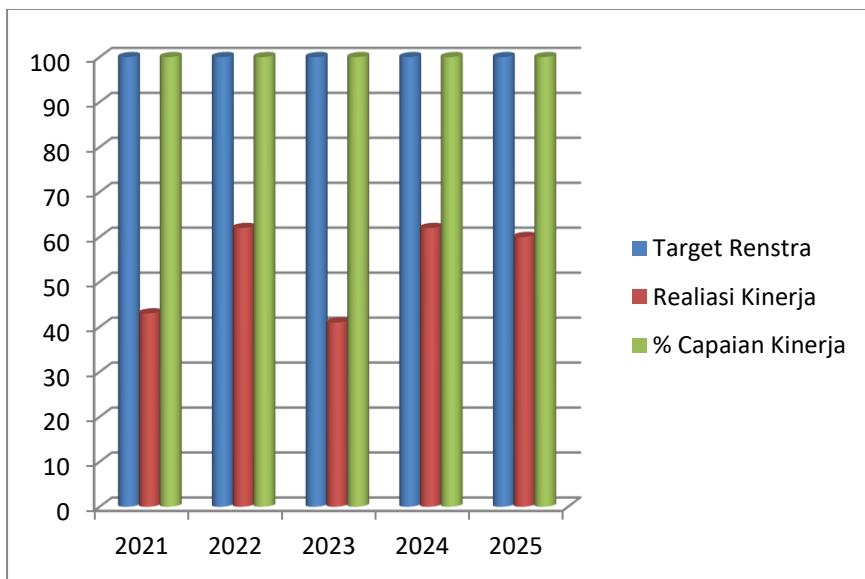
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase Penurunan konflik sosial Masyarakat	Tahun	100%	100%	100	100%	100%	100	Berhasil

Di lihat dari tabel 3.4.1 dapat dilihat bahwa indikator kinerja berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah Persentase penanganan konflik sosial di daerah yang ditindaklanjuti atau keberhasilan tahun 2024 dan tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan 100% dengan interpretasi sangat berhasil. Sedangkan pada tabel 3.4.2 perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja berdasarkan renstra 2025-2030 dapat dilihat dari tabel tidak bisa membandingkan pada tahun sebelumnya karna indicator baru muncul pada perubahan tahun 2025. Dilihat dari tabel 3.4 di atas Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menangani konflik social di Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Penanganan konflik Sosial di Daerah ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Berdasrakan Renstra 2021-2025

Perbandingan target pada Renstra 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra	80	83	85	90	95
Realiasi Kinerja				100	100
% Capaian Kinerja				111	105

Realisasi Indikator Kinerja "Persentase penanganan konflik sosial di daerah" pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman berhasil di tangani dengan baik . Realisasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2021 sd 2025 persentase capaian kinerja selalu mencapai 100% dari target di Renstra. Dan untuk Indikator Kinerja dalam Renstra 2025-2030 tingkat keberhasilannya belum bisa kami bandingkan dengan tahun sebelumnya.

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja dan Hambatan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Keberhasilan dari capaian kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Padang Pariaman yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari Faktor pendukung sebagai berikut :

1. Keseriusan Pemerintah melakukan audiensi dengan masyarakat yang terdampak untuk mengevaluasi peruntukan lahan dan memastikan kepada masyarakat untuk transparansi pembayaran ganti rugi.
2. Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Forkopimda terkait Melakukan dialog besar yang melibatkan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), MUI, KAN dan Tokoh Masyarakat untuk mengaktifkan kembali Kontrol Sosial di tingkat Nagari di Padang Pariaman.
3. Meningkatkan peran adat untuk memanfaatkan kepemimpinan Datuak dalam system Adat Minangkabau di perkuat untuk menyelesaikan konflik internal kaum, terutama terkait tanah pusako agar tidak meluas menjadi konflik horizontal.
4. Melakukan Mediasi Adat untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui 32okum adat yang lebih mengutamakan kedamaian jangka panjang dari pada menangkalah secara 32okum.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam capaian kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial Daerah adalah :

1. Dualisme Kepemimpinan (Format vs Adat)

Sering terjadi ketidaksinkronan antara keputusan Wali Nagari (Pemerintah) dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan adat, mereka cenderung membawanya ke ranah hokum formal yang terkadang justru memperpanjang konflik

2. Sengketa Tanah Ulayat

Sebagian besar konflik di Padang Pariaman berakar pada masalah lahan terkait pembangunan infrastruktur strategis seperti Status Tanah yang kepemilikannya yang bersifat komunal seringkali memiliki batas batas yang hanya diingat secara lisan (sejarah tutur) dan Ahli Waris yang terpecah yang banyak merantau saat tanah akan dibebaskan atau di proses sulit untuk mendapatkan kesepakatan bulat dari seluruh anggota keluarga sehingga memicu konflik keluarga.

3. Pergeseran nilai Ninik Mamak yang secara tradisional ninik mamak adalah pemimpin adat yang merupakan penengah utama namun terdapat tantangan krisis otoritas dimana generasi muda terkadang kurang menghormati keputusan adat jika dianggap tidak relevan dengan kondisi zaman.

Strategi mencegah konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman untuk kedepannya adalah :

1. Mengoptimalkan musyawarah untuk mencapai mufakat antara Wali Nagari, Ninik Mamak, LKAAM dan KAN di Nagari Nagari yang berpotensi terjadi konflik social
2. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk mendeteksi dini potensi gesekan antar kelompok masyarakat baik karena perbedaan pandangan konflik maupun latar belakang sosial.
3. Pemberdayaan Pemuda (Parik Paga Nagari) yang memiliki peran strategis sebagai pagar desa dengan melibatkan mereka dalam kegiatan positif, potensi konflik akibat kenakalan remaja atau provokasi bisa diminimalisir

Transparansi pengelolaan dana desa dan pembangunan karena konflik sering muncul kecemburuan social terkait pembagian bantuan atau lokasi proyek pembangunan untuk memastikan proses pembangunan di tingkat nagari melibatkan partisipasi aktif warga agar tidak ada pihak yang merasa di tinggalkan

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Table 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketertiban Umum/stabilitas	Persentase Penurunan konflik sosial Masyarakat	100%	82.60%	17.40%

Efisiensi capaian kinerja = $100\% - 100\% = 0.00\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 82.60\% = 17.40\%$

Total Efisiensi = $0.00\% + 17.40\% = 17.40\%$

Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 17.40% dan efisiensi kinerja sebesar 0%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 17.40%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator kinerja Persentase penanganan konflik sosial di daerah ini "sangat baik

f. Analis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Program ini hanya terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan

Dianggarkan sebesar Rp667.526.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp.594.178.458,00 atau 89.01%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- Pembentukan Paskibraka

Dengan Anggaran sebesar Rp667.526.000,00 dan terealisasi sebesar Rp594.178.458,00 atau sebesar 89.01%. kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah tentukan dalam penyerapan dana kegiatan dan sesuai dengan RAB kegiatan yang telah direncanakan. Adapun pencapaian kinerja dan realisasi keuangan dapat di lihar di Tabel dibawah ini ssb;

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	1	1	tahun	667,526,000	594,178,458	89.01
a.	Pembentukan Paskibraka	1	1	tahun	667,526,000	594,178,458	89.01
J u m l a h					667,526,000	594,178,458	89.01

Foto yang mendukung Kegiatan Kegiatan yang telah dilaksanakan :



2. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Program ini hanya terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Anggaran sebesar Rp335.428.000,00 dan realisasi sebesar Rp252.188.500,00 atau 75.18%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- **Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**

Sub kegiatan ini dianggarkan Rp14.672.000,- terealisasi Rp14.550.000.00,- atau 99.17% dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan Informasi terhadap Upaya Peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah

Foto yang mendukung kegiatan yang telah dilaksanakan



Foto dalam rangka Kewaspadaan Dini

- **Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini dianggarkan Rp320.756.000,- terealisasi Rp237.638.500,- atau 74.09% dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya Koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan di Kabupaten Padang Pariaman yang di ikuti oleh Bupati Padang Pariaman, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Padang Pariaman, Kepala Kepolisian Padang Pariaman, Dandim 008 Pariaman dan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1	1	Tahun	335,428,000	252,188,500	75.18
a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitas Kelenbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	Tahun	14,672,000	14,550,000.00	99.17
b.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Tahun	320,756,000	237,638,500.00	74.09
Jumlah					335,428,000	252,188,500.00	75.18

Foto yang mendukung Kegiatan Kegiatan yang telah dilaksanakan :
 Foto Forkopimda Tahun tetang isu isu politik dan Konflik Masyarakat Tahun 2025 di Padang Pariaman :



**Sasaran kedua:****Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Kantor**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya
Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Kantor

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Hasil Penilaian SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	80.01	77.70	97.11	Berhasil

Untuk target pada Indikator Kinerja Hasil Penilaian SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun ini adalah 80.01 dimana Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik mendapat nilai BB, realisasi dari indikator tersebut adalah 77.70 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97.11%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator ini yang sama capaian 100%.

b) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.8.

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025

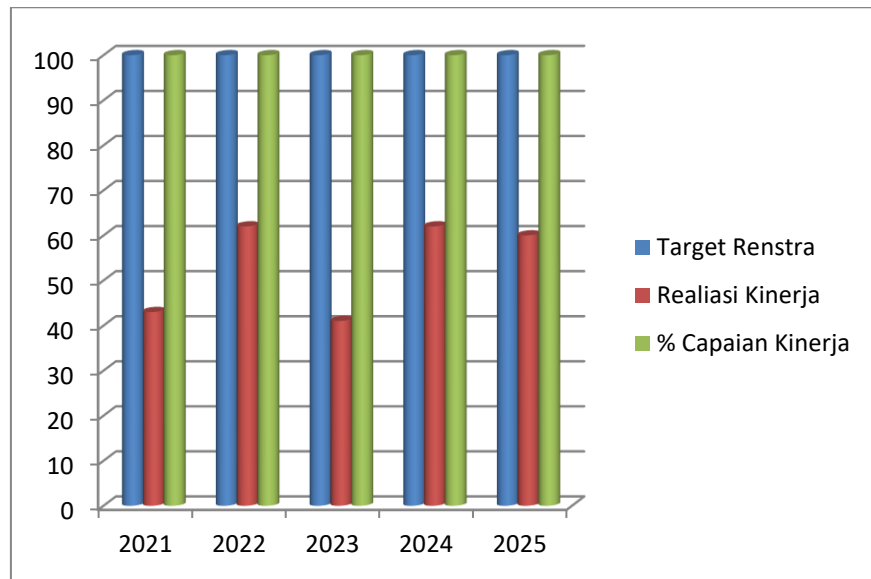
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Hasil Penilaian SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahun	75 (BB)	75,40 (BB)	100	80.01 (A)	77.70	97.11%	Berhasil

Di lihat dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa indikator kinerja Hasil Penilaian SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 dan tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan interpretasi Berhasil. Hal ini ada kegiatan kegiatan yang belum laksanakan oleh Pelaksaaan Tugas Kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan baik, hal ini menunjukkan adanya Kantor Kesbang untuk bisa meningkatkan Kinerja Kantor dan dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara rekan rekan kerja Kantor Kesbangpol.

c) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 dengan Target Renstra

Pada tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Hasil Penilaian SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditindaklanjuti tahun 2024 dan tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan 97.11% dengan interpretasi Berhasil. Hal ini didukung oleh Tim Sakip Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meujudkan taget yang telah di tentukan.

Dibawah ini adalah Perbandingan target pada Renstra 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra	BB	BB	BB	BB	BB
Realiasi Kinerja				75,40	77,70
% Capaian Kinerja				100%	100%

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja dan Hambatan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Beberapa capaian positif yang biasanya menjadi pendongkrak nilai komponen AKIP (Perencanaan, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja) meliputi:

1. Cascading (Penyelarasan) Kinerja yang Jelas: Target kinerja Kepala Badan Kesbangpol telah di-cascade dengan baik hingga ke tingkat Kepala Bidang (Eselon III), Pengawas/Ketua Tim, dan Pelaksana melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. Terjaganya Kondusivitas Wilayah: Keberhasilan memitigasi potensi gesekan sosial (misalnya terkait pengadaan tanah proyek strategis nasional atau pasca-pemilu/pilkada) sehingga Indeks Kondusivitas Daerah tetap berkategori tinggi.

3. Ketepatan Pelaporan Timdu: Pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial yang tepat waktu dan berjenjang ke Kementerian Dalam Negeri, yang berkontribusi positif pada penilaian akuntabilitas output.
4. Pemanfaatan Aplikasi Kinerja: Pengisian data capaian kinerja yang mulai terintegrasi secara digital, mempermudah monitoring berkala (triwulanan/semesteran)..

Alternatif Solusi yang Diharapkan

Untuk menaikkan bobot penilaian pada setiap komponen AKIP (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja), berikut alternatif solusi strategis yang dapat diterapkan:

Komponen AKIP Rekomendasi Solusi / Aksi Nyata

Perencanaan Kinerja Redefinisi Indikator (IKU): Mengubah formulasi indikator agar lebih berorientasi outcome. Misalnya, dari "Jumlah rapat koordinasi Intelijen" menjadi "Persentase potensi konflik yang berhasil diredam sebelum eskalasi".

1. **Pengukuran Kinerja.** Digitalisasi Pengukuran Real-Time: Membangun dashboard kendali kinerja internal yang memetakan capaian fisik dan serapan anggaran secara bulanan, agar deviasi target langsung terlihat.
2. **Evaluasi Internal.** Reformasi Rapat Evaluasi: Mengubah agenda rapat pleno bulanan/triwulanan dari sekadar membaca laporan realisasi anggaran menjadi forum bedah hambatan capaian target IKU secara kritis.
3. **Pemanfaatan Data.** Sinergi Instansi & Mitra: Memanfaatkan Local Wisdom (Tokoh Adat/Masyarakat) dan berkolaborasi dengan akademisi lokal untuk membuat instrumen survei indeks kinerja yang objektif dan diakui secara metodologi.
4. **Kapasitas SDM.** Asistensi Intensif (Coaching Clinic): Melakukan bimbingan teknis berkala khusus dari Tim Evaluator SAKIP Inspektorat Daerah/Kemenpan-RB untuk menyelaraskan pohon kinerja (performance tree) Kesbangpol.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Table 3.9.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Kantor	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	97.11%	90%	7,11%

Efisiensi capaian kinerja = $97.11\% - 100\% = -2,89\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 90\% = 10\%$

Total Efisiensi = $-2,89\% + 10\% = 7,11\%$

F. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	1	Tahun	22,950,000.00	22,382,843.00	97.53
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1	1	Tahun	10,810,000.00	10,423,558.00	96.43
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Tahun	12,140,000.00	11,959,285.00	98.51
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	Tahun	957,913,052.00	932,704,003.00	97.37
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	Tahun	895,873,052.00	871,174,003.00	97.24
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	Tahun	62,040,000.00	61,530,000.00	99.18
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	Tahun	88,630,000.00	62,345,366.00	70.34
a.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	Tahun	5,010,000.00	877,800.00	17.52
b.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Tahun	83,620,000.00	61,467,566.00	73.51
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1	1	Tahun	245,202,900.00	147,561,140.00	60.18
a.	Penyediaan Jasa Surat	1	1	Tahun	20,036,000.00	18,111,500.00	90.39
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Tahun	11,570,000.00	11,250,000.00	97.23
c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	Tahun	213,596,900.00	118,199,640.00	55.34
6	Pemeliharaan Barang Milik	1	1	Tahun	18,205,990.00	18,010,000.00	98.92
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak	1	1	Tahun	18,205,990.00	18,010,000.00	98.92
J u m l a h					1,332,901,942.00	1,183,003,352.00	88.75

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota .

Anggaran **Rp1.332.901.942,00** dan realisasi **Rp. 1.183.003.352** atau sebesar **88.75%** dengan sisa dana sebesar **Rp. 149.818.590**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk operasional dan mempelancar adminitrasi kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran Rp. 957.913.052.,00 dan realisasi Rp. 932.704.003,00 atau sebesar 97.37% dengan sisa dana sebesar Rp. 25.209.049.. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhi pelayanan Pemerintah daerah nilai saki pemerintah daerah hasil evaluasi inspektorat persentase temuan BPK yang di tidaklanjuti dengan hasil Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah

2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daaerah.

Anggaran Rp.22.950.000,00 dan realisasi Rp. 22.382.843,00 atau sebesar 97.53% dengan sisa dana sebesar Rp. 567.157,00. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar meningkatnya perencanaan pengagaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Anggaran Rp. 88.630.000,00 dan realisasi Rp. 62.345.366,00 atau sebesar 70.34% dengan sisa dana sebesar Rp.150.975.366,00. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi umum perangkat daerah

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran Rp. 245.202.900,00 dan realisasi Rp. 147.561.140,00 atau sebesar 60.18% dengan sisa dana sebesar Rp. 97.641.760,00. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi umum perangkat daerah

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran Rp. 18.205.990,00 dan realisasi Rp. 18.010.000,00 atau sebesar 98.92% dengan sisa dana sebesar Rp. 195.490,00. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi umum perangkat daerah

3.1.2. Realisasi Kinerja Sasaran Startegis Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

	Sasaran Pertama : Meningkatkan ketahanan Idiologi Ketahanan Nasional dan Kualitas Kehidupan Demokrasi Indikator: Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
---	---

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

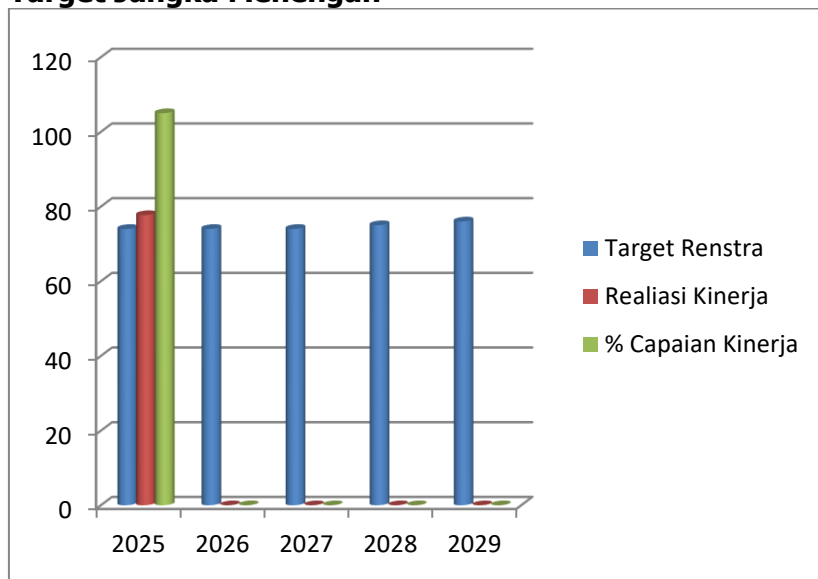
Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	85	85	100%	Berhasil

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.11.
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun 2025
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisai	%	Target	Realisai	% Capaian	
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Tahun	-	-	-	85	85	100%	Berhasil

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU dalam Renstra 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah



	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra	85	87	88	90	92
Realiasi Kinerja	85	0	0	0	0
% Capaian Kinerja	100	0	0	0	0

Dari tabel dan bagan di atas dapat kami jelaskan bahwa perbandingan untuk tahun sebelum belum bisa kami tampilkan perbandingan karena indikator baru di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja dan Hambatan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Analisis kinerja terhadap indikator "Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Wawasan Kebangsaan" di Kabupaten Padang Pariaman umumnya berada di bawah kendali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Indikator ini sangat krusial untuk menjaga integrasi sosial, meminimalisir potensi konflik radikalisme, serta meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah era digitalisasi.

Berikut adalah analisis komprehensif mengenai program penunjang, hambatan, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan:

1. Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Untuk mencapai target persentase tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengandalkan beberapa program strategis, antara lain:

Program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) yang menyasar pemuda, tokoh masyarakat, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, khususnya pelajar SMA/SMK/MA sederajat di Padang Pariaman guna menanamkan hak dan kewajiban warga negara.

Program Pemberdayaan Ormas dan LSM:

Pembinaan Ormas/LSM, yang diarahkan agar organisasi kemasyarakatan di Padang Pariaman menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan menjaga kondusifitas daerah.

Optimalisasi Peran Forum Pembinaan Pembauran Kebangsaan (FPBK):

Kegiatan dialog antar-etnis, suku, dan agama untuk merawat keberagaman masyarakat Padang Pariaman yang kian berkembang. Pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) :

Penguatan kelembagaan PPWK di tingkat kabupaten hingga kecamatan sebagai motor penggerak edukasi bela negara.

2. Hambatan Pencapaian Kinerja

Meskipun berbagai kegiatan telah berjalan, ada beberapa tantangan (bottleneck) yang menghambat luasan jangkauan (coverage) indikator ini:

Keterbatasan Jangkauan Korporat & Kultural (Geografis): Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah yang cukup luas dengan topografi bervariasi (pesisir hingga perbukitan/nagari pedalaman). Sosialisasi konvensional berbasis tatap muka sering kali tidak mampu menjangkau masyarakat di pelosok Nagari secara merata.

Keterbatasan Anggaran Fiskal Daerah: Anggaran yang dialokasikan untuk kedinasan (Bakesbangpol) sering kali terbatas, sehingga volume kegiatan sosialisasi tidak sebanding dengan total jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman.

Metode Sosialisasi yang Monoton: Pola penyampaian wawasan kebangsaan sering kali masih bersifat ceramah satu arah (top-down). Pendekatan ini kurang menarik minat generasi Z dan milenial yang saat ini mendominasi piramida penduduk.

Distraksi dan Penetrasi Media Sosial: Derasnya arus informasi, hoaks, dan paham-paham individualis/radikal di media sosial lebih cepat memengaruhi masyarakat dibanding materi wawasan kebangsaan yang intensitasnya dinilai masih minim.

3. Alternatif Solusi & Rekomendasi Strategis

Guna mengatasi hambatan di atas dan menggenjot capaian indikator kinerja, berikut adalah alternatif solusi yang dapat diimplementasikan:

A. Transformasi Metode (Pemanfaatan Digital Smart Governance)

Produksi Konten Kreatif: Mengubah materi wawasan kebangsaan yang kaku menjadi konten video pendek (TikTok, Instagram Reels) atau podcast lokal dengan melibatkan influencer atau tokoh pemuda Padang Pariaman.

E-Learning Kebangsaan: Bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk membuat modul berbasis webinar atau kuis digital interaktif yang berhadiah menarik untuk menarik minat generasi muda.

B. Strategi Kolaborasi (Pola Hubungan Antar Lembaga)

Integrasi Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal (Tau di Nan Ampek): Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyisipkan nilai-nilai wawasan kebangsaan yang diselaraskan dengan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Gerakan "Nagari Pelopor Kebangsaan": Melibatkan Pemerintahan Nagari (Desa Adat) menggunakan dana desa/nagari untuk mengadakan forum pemuda sadar hukum dan bela negara secara mandiri (replikasi program).

C. Efisiensi Penga

Efisiensi Penganggaran & Skala Prioritas

Pola Train of Trainers (ToT): Alih-alih mengumpulkan massa dalam jumlah besar yang memakan biaya tinggi, Bakesbangpol cukup melatih perwakilan tokoh pemuda (KNPI, Karang Taruna), niniak mamak, dan alim ulama. Merekalah yang nantinya wajib mendiseminasikan wawasan tersebut ke komunitasnya masing-masing.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Table 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya ketahanan idiologi ketahanan nasional dan kualitas kehidupan demokrasi	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	66.40%	33.60%

Efisiensi capaian kinerja = $100\% - 100\% = 0.00\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 66.40\% = 33.60\%$

Total Efisiensi = $0.00\% + 33.60\% = 33.60\%$

Dilihat dari tabel diatas Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 33.60% dan efisiensi kinerja sebesar 0%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 33.60%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator kinerja cukup efisiensi

f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Program ini hanya terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dianggarkan sebesar Rp9.350.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.295.000,00 atau 56.63%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Anggaran sebesar Rp6.260.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.605.000,00 atau 41.61%.

b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Anggaran sebesar Rp3.090.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.690.000,00 atau 87.06%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan tetapi realisasi output kurang maksimal di karenakan rekening belanja Bahan Pakai habis tidak terlaksana dengan maksimal.

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	1	tahun	9,350,000.00	5,295,000.00	56.63
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1	Tahun	6,260,000.00	2,605,000.00	41.61
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1	Tahun	3,090,000.00	2,690,000.00	87.06
J u m l a h					9,350,000.00	5,295,000.00	56.63

Foto yang mendukung keberhasilan Indikator





Sasaran Pertama : Meningkatnya ketahanan Idiologi Ketahanan Nasional dan Kualitas Kehidupan Demokrasi

Indikator: Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.13

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	85	85	100%	Berhasil

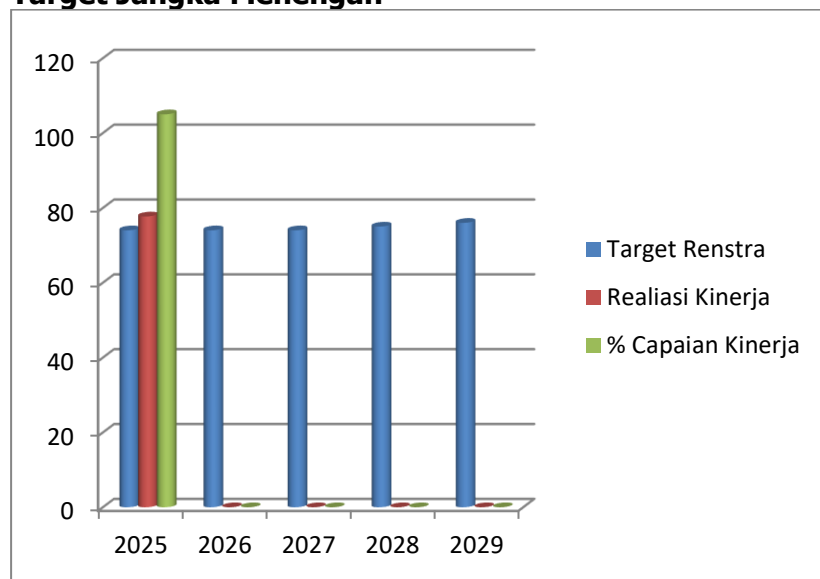
b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.14.

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Tahun	-	-	-	85	85	100	Berhasil

c. **Perbandingan Realisasi Capaian IKU dalam Renstra 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah**



	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra	85	87	88	90	92
Realiasi Kinerja	85	0	0	0	0
% Capaian Kinerja	100	0	0	0	0

Dari tabel dan bagan di atas dapat kami jelaskan bahwa perbandingan untuk tahun sebelum belum bisa kami tampilkan perbandingan karena indikator baru di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

d. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja dan Hambatan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.**

Penyusunan analisis capaian indikator "Jumlah/Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik" di Kabupaten Padang Pariaman sangat erat kaitannya dengan tugas pokok fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta sinergi dengan instansi vertikal (KPU, Bawaslu) dan Partai Politik.

Berikut adalah analisis program, hambatan, serta alternatif solusi yang terstruktur untuk mendukung akuntabilitas kinerja (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

1. Analisis Program dan Kegiatan Menunjang

Untuk memastikan indikator ini tercapai secara optimal, program kerja dialokasikan melalui kombinasi edukasi langsung, pemanfaatan dana hibah, dan pelibatan lembaga masyarakat sipil (Ormas/LSM). Program Penguatan Demokrasi Lokal dan Hak Konstitusional Warga:

Kegiatan Dialog Politik Bersama Ormas dan Tokoh Masyarakat: Pendekatan ini berfokus pada pimpinan organisasi massa dan keterwakilan kelompok perempuan di tingkat kecamatan hingga nagari guna membangun tatanan demokrasi yang ideal dan dinamis. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula: Kegiatan yang menysar sekolah (SMA/SMK/MA) dan universitas lokal demi menangkal apatisisme politik di kalangan generasi muda. Optimalisasi dan Pengawasan Hibah Partai Politik (Parpol):

Sesuai regulasi nasional, minimal 51% dari alokasi dana hibah parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman wajib diarahkan untuk pelaksanaan pendidikan politik, kaderisasi, serta literasi demokrasi bagi konstituen mereka. Kemitraan Strategis Berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi : Pelaksanaan kerja sama (MoU) dengan kampus/institut agama Islam dan perguruan tinggi lokal di Sumatera Barat untuk menurunkan akademisi sebagai pengajar/fasilitator materi kesadaran hukum dan hak politik masyarakat di tingkat Nagari.

2. Hambatan Pencapaian Kinerja

Meskipun realisasi serapan kegiatan sering kali mencapai target administratif, terdapat beberapa hambatan substantif di lapangan yang memengaruhi kualitas capaian indikator:

Geografis dan Jangkauan Wilayah (Faktor Sebaran): Kesulitan menjangkau masyarakat di wilayah nagari yang pelosok atau pedalaman secara merata akibat keterbatasan armada mobilitas dan penganggaran operasional.

Tingginya Arus Informasi Digital Tanpa Filter: Perkembangan teknologi informasi yang cepat memicu maraknya penyebaran hoaks, disinformasi politik, dan polarisasi digital yang melumpuhkan substansi pendidikan politik konvensional.

Apatisme dan Budaya "Pragmatisme" Politik: Masih kuatnya fenomena toleransi terhadap money politics (politik uang) di sebagian lapisan masyarakat, yang kerap mengaburkan output edukasi nilai demokrasi yang ditanamkan.

Ketergantungan pada Metode Konvensional: Pola sosialisasi yang masih dominan bersifat tatap muka di dalam gedung/aula (seperti model seminar formal), sehingga daya tampung peserta menjadi sangat terbatas dan kurang menarik bagi generasi milenial/Gen Z.

3. Alternatif Solusi / Strategi Perbaikan

Untuk mengatasi hambatan di atas dan memproyeksikan lompatan kinerja pada periode penganggaran berikutnya, berikut beberapa alternatif strategi yang bisa diambil:

Hambatan Alternatif Solusi / Langkah Strategis Output Kinerja yang Diharapkan
Keterbatasan Jangkauan Fisik Mengadopsi program "Kesbangpol Go to Nagari" dengan memanfaatkan sistem kluster per wilayah daerah pemilihan (Dapil) dan melibatkan Wali Nagari secara aktif sebagai fasilitator lokal. Efisiensi anggaran dan pemerataan sebaran indeks pemilih yang tereduksi.

Ancaman Hoaks & Disinformasi Membentuk wadah koordinasi digital (Forum Literasi Digital Politik) berkolaborasi dengan Diskominfo dan pegiat media sosial lokal untuk memproduksi konten edukasi kreatif. Masyarakat mampu menyaring informasi dan menolak kampanye hitam (black campaign).

Maraknya Pragmatisme / Politik Uang Penguatan program Desa/Nagari Binaan Sadar Pemilu Bersih, bekerja sama secara formal dengan Bawaslu untuk pembentukan "Nagari Anti-Politik Uang". Meningkatnya kesadaran konstituen untuk memilih berdasarkan program kerja, bukan materi.

Metode Sosialisasi Monoton Transformasi metode edukasi menggunakan pendekatan gamifikasi politik, podcast interaktif, serta aktivasi sosialisasi berbasis komunitas (karang taruna, majelis taklim, dan kelompok seni tradisional). Peningkatan partisipasi aktif dari kelompok usia muda dan segmen masyarakat akar rumput.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Table 3.15.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
f)

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya ketahanan ideologi ketahanan nasional dan kualitas kehidupan demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	100%	99.92%	0.08%

Efisiensi capaian kinerja = $100\% - 100\% = 0.00\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 99.92\% = 0.08\%$

Total Efisiensi = $0.00\% + 0.08\% = 0.08\%$

Dilihat dari tabel diatas Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 0.08% dan efisiensi kinerja sebesar 0%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 0.08%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator kinerja tidak ada efisiensi dalam indikator ini

f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.015.380.000,00 Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp1.014.580.300,00 atau 99.93%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Serta Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Dianggarkan Rp1.015.380.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut terrealisasikan sebesar Rp1.014.580.300,00,- atau 99.93%.. Kegiatan ini hanya terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp999.360.000,00,- terrealisasi sebesar Rp999.360.000,00,- atau sebesar 100% dimaksudkan untuk mendukung kegiatan kegiatan di partai politik. Kegiatan ini merupakan bantuan hibah yang diberikan kepada partai-partai yang anggotanya duduk di DPRD Kab. Padang Pariaman dihitung dengan suara sah yang masuk ke Partai Politik, yang mana Partai Politik yang mendapatkan suara sah di Kabupaten Padang Pariaman ada 9 (Sembilan) Partai adalah sebagai berikut :

1. PAN	= Rp. 174.595.000,-
2. Gerindra	= Rp. 130.210.000,-
3. PKB	= Rp. 126.540.000,-
4. Demokrat	= Rp. 113.720.000,-
5. Golkar	= Rp. 112.755.000,-
6. Nasdem	= Rp. 110.920.000,-
7. PKS	= Rp. 107.070.000,-
8. PPP	= Rp. 73.420.000,-
9. PDIP	= Rp. 50.130.000,-
JUMLAH	= Rp. 999.360.000.-

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Kegiatan ini berupa kegiatan monitoring dengan partai partai yang ada kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman Anggarannya sebesar Rp. 3.080.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.585.300,00.- atau 83.94%

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.12.940.000,00,-terrealisais sebesar Rp.12.635.000,00,- atau sebesar 97.64% sub kegiatan untuk kegiatan pemantuan stuasi politik di Kab. Padang Pariaman dan biaya perjalanan dinas untuk pemantauan situasi politik di Daerah Padang Pariaman .

Kinerja keuangan atas Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Serta Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	1	Tahun	1.015.380.000,00	1.014.580.300,00	99,92
a.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	1	1	tahun	999.360.000,00	999.360.000,00	100,00
b.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum	1	1	tahun	3.080.000,00	2.585.300,00	83,94
c.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	1	Tahun	12.940.000,00	12.635.000,00	97,64
J u m l a h					1.015.380.000,00	1.014.580.300,00	99,92



Sasaran Pertama : Meningkatnya ketahanan Idiologi Ketahanan Nasional dan Kualitas Kehidupan Demokrasi
Indikator: Persentase Penurunan Jumlah Konflik

A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Penurunan Jumlah Konflik

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Penurunan Jumlah Konflik	80%	80%	100%	Berhasil

Untuk mencapai kinerja “Persentase Penanganan Jumlah Konflik”, Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Program/Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut, yaitu:

- Program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Kegiatan ini adalah FGD untuk memfasilitasi komunikasi pimpinan untuk membahas masalah masalah 59okum59 terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan untuk mencari solusi serta penyelesaian yang tepat. Kegiatan ini di Anggarkan sebesar Rp. 320.756.000,00 yang terealisasi sebesar 237.638.000,00 atau 74.09% yang dilaksanakan sebanyak 9 kali pertemuan yang di ikuti oleh : Bupati Padang Pariaman, Kapolres Padang Pariaman, Dandim Pariaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman dan Sekretaris Daerah Padang Pariaman

b) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.17.

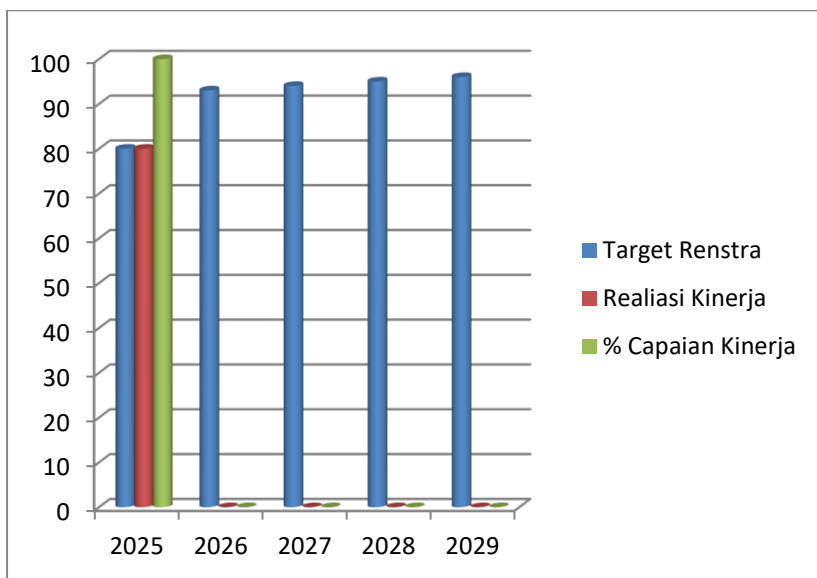
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Penanganan Jumlah Konflik	Tahun	N/A	N/A	N/A	80%	80%	100%	Berhasil

Di lihat dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Persentase Penanganan Jumlah Konflik tidak bisa kami bandingkan pada tahun 2024 dan tahun 2025 tidak bisa membandingkan pada tahun sebelumnya karna indikatornya baru muncul pada perubahan tahun 2025..

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra	80	93	94	95	96
Realiasi Kinerja	80	0	0	0	0
% Capaian Kinerja	100	0	0	0	0

Realisasi Indikator Kinerja "Persentase penanganan konflik" pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman berhasil di tangani dengan baik . Realisasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2025 sd 2029 persentase capaian kinerja selalu mencapai 100% dari target di RPJMD. Dan untuk Indikator Kinerja dalam Renstra 2025-2029 tingkat keberhasilannya belum bisa kami bandingkan dengan tahun sebelumnya.

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja dan Hambatan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Keberhasilan dari capaian kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Padang Pariaman yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari Faktor pendukung sebagai berikut :

1. Keseriusan Pemerintah melakukan audiensi dengan masyarakat yang terdampak untuk mengevaluasi peruntukan lahan dan memastikan kepada masyarakat untuk transparansi pembayaran ganti rugi.
2. Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Forkopimda terkait Melakukan dialog besar yang melibatkan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), MUI, KAN dan Tokoh Masyarakat untuk mengaktifkan kembali Kontrol Sosial di tingkat Nagari di Padang Pariaman.
3. Meningkatkan peran adat untuk memanfaatkan kepemimpinan Datuak dalam system Adat Minangkabau di perkuat untuk menyelesaikan konflik internal kaum, terutama terkait tanah pusako agar tidak meluas menjadi konflik horizontal.
4. Melakukan Mediasi Adat untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui 61okum adat yang lebih mengutamakan kedamaian jangka panjang dari pada menang-kalah secara 61okum.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam capaian kinerja Persentase Penangan Konflik Sosial Daerah adalah :

1. Dualisme Kepemimpinan (Format vs Adat)
Sering terjadi ketidaksinkronan antara keputusan Wali NAgari (Pemerintah) dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan adat, mereka cenderung

membawanya ke ranah hukum formal yang terkadang justru memperpanjang konflik

2. Sangketa Tanah Ulayat

Sebagian besar konflik di Padang Pariaman berakar pada masalah lahan terkait pembangunan infrastruktur strategis seperti Status Tanah yang kepemilikannya yang bersifat komunal seringkali memiliki batas batas yang hanya diingat secara lisan (sejarah tutur) dan Ahli Waris yang terpencar yang banyak merantau saat tanah akan dibebaskan atau di proses sulit untuk mendapatkan kesepakatan bulat dari seluruh anggota keluarga sehingga memicu konflik keluarga.

3. Pergeseran nilai Ninik Mamak yang secara tradisional ninik mamak adalah pemimpin adat yang merupakan penengah utama namun terdapat tantangan krisis otoritas dimana generasi muda terkadang kurang menghormati keputusan adat jika dianggap tidak relevan dengan kondisi zaman.

Strategi mencegah konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman untuk kedepannya adalah :

1. Mengoptimalkan musyawarah untuk mencapai mufakat antara Wali Nagari, Ninik Mamak, LKAAM dan KAN di Nagari Nagari yang berpotensi terjadi konflik social
2. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk mendeteksi dini potensi gesekan antar kelompok masyarakat baik karena perbedaan pandangan konflik maupun latar belakang sosial.
3. Pemberdayaan Pemuda (Parik Paga Nagari) yang memiliki peran strategis sebagai pagar desa dengan melibatkan mereka dalam kegiatan positif, potensi konflik akibat kenakalan remaja atau provokasi bisa diminimalisir

Transparansi pengelolaan dana desa dan pembangunan karena konflik sering muncul kecemburuan social terkait pembagian bantuan atau lokasi proyek pembangunan untuk memastikan proses pembangunan di tingkat nagari melibatkan partisipasi aktif warga agar tidak ada pihak yang merasa di tinggalkan

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Table 3.18.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
g)

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya ketahanan Idiologi Ketahanan Nasional dan Kualitas Kehidupan Demokrasi	Persentase Penanganan Jumlah Konflik	100%	74%	26%

Efisiensi capaian kinerja = $100\% - 100\% = 0.00\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 76\% = 26\%$

Total Efisiensi = $0.00\% + 26\% = 26\%$

Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 26% dan efisiensi kinerja sebesar 0%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 26%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator kinerja Persentase penanganan konflik sosial di daerah ini sangat baik

g. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Program ini hanya terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (dua) sub kegiatan, yaitu :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dianggarkan Rp320.756.000,- terealisasi Rp237.638.500,- atau 74.09% dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya Koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan di Kabupaten Padang Pariaman yang di ikuti oleh Bupati Padang Pariaman, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Padang Pariaman, Kepala Kepolisian Padang Pariaman, Dandim 008 Pariaman dan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1	1	Tahun	320,756,000	237,638,500	74.09
b.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Tahun	320,756,000	237,638,500.00	74.09
Jumlah					320,756,000	237,638,500.00	74.09

Foto yang mendukung Kegiatan Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Foto Forkopimda Tahun tetang isu isu politik dan Konflik Masyarakat Tahun 2025 di Padang Pariaman :





Sasaran Pertama : Meningkatnya Ketahanan Idiologi, Ketahanan Nasional dan Kualitas Kehidupan Demokrasi
Indikator: Persentase Potensi Konflik Kewaspadaan Dini yang tertangani

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.19

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Potensi Konflik Kewaspadaan Dini yang tertangani	92%	92%	100%	Berhasil

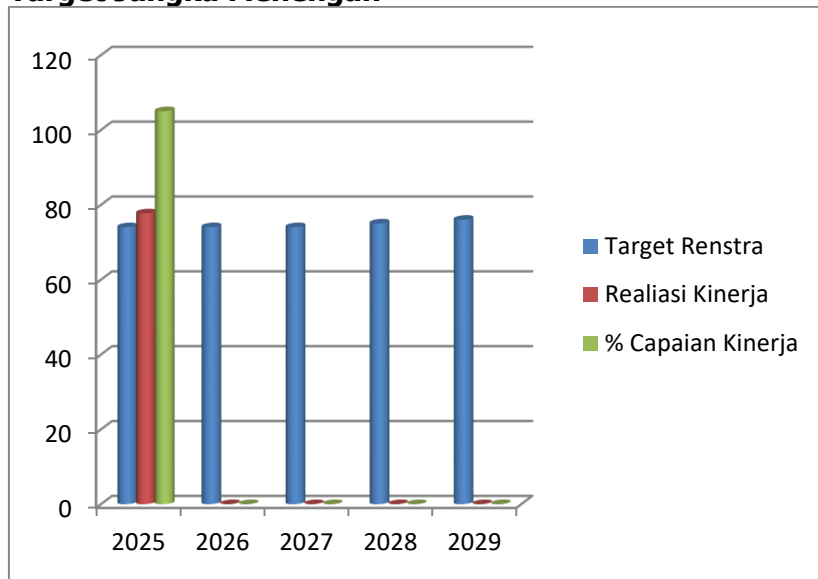
b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.20

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025
Persentase Potensi Konflik Kewaspadaan Dini yang tertangani

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Potensi Konflik Kewaspadaan Dini yang tertangani	Tahun	-	-	-	92%	92%	100	Berhasil

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU dalam Renstra 2025-2039 dengan Target Jangka Menengah



	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra	92	94	95	97	98
Realiasi Kinerja	92	0	0	0	0
% Capaian Kinerja	100	0	0	0	0

Dari tabel dan bagan di atas dapat kami jelaskan bahwa perbandingan untuk tahun sebelum belum bisa kami tampilkan perbandingan karena indikator baru di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja dan Hambatan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

Berikut adalah analisis program dan kegiatan terkait indikator "Persentase Potensi Konflik/Kewaspadaan Dini yang Tertangani" di Kabupaten Padang Pariaman.

Analisis ini disusun untuk memetakan capaian keberhasilan, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta merumuskan alternatif solusi yang aplikatif bagi pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah.

1. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Secara umum, penanganan potensi konflik di Padang Pariaman menunjukkan tren positif berkat pendekatan yang memadukan jalur formal birokrasi dan jalur kultural lokal. Optimalisasi Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial: Koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Daerah, TNI (Kodim), Polri (Polres Padang Pariaman dan Polres Pariaman), serta Kejaksaa berjalan responsif dalam mendeteksi riak-riak di masyarakat. Pemanfaatan Lembaga Kultural (Kewaspadaan Berbasis Adat): Pelibatan aktif Tungku Tigo Sajarangan

Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai) serta Bundo Kanduang terbukti efektif meredam eskalasi. Pendekatan persuasif melalui musyawarah mufakat seringkali menyelesaikan masalah sebelum masuk ke ranah hukum. Fasilitas Penyelesaian Sengketa Lahan Strategis: Keberhasilan penanganan hambatan pada proyek strategis nasional (seperti kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin) melalui dialog intensif mengenai ganti kerugian dan ulayat menjadi salah satu indikator utama keberhasilan deteksi dini. Aktifnya Forum Komunikasi: Komunikasi berkala melalui FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) hingga ke tingkat kecamatan membantu memetakan kerawanan secara real-time.

2. Hambatan Pencapaian Kinerja

Meskipun capaian penanganan dinilai cukup baik, terdapat beberapa hambatan klasik dan kontemporer yang menantang akurasi kewaspadaan dini:

Kompleksitas Sengketa Tanah Ulayat: Masalah batas tanah, legalitas ulayat, dan perbedaan persepsi antar-kaum/kaum dengan pemerintah dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur daerah membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang dan melelahkan. Keterbatasan Jangkauan Teknis dan SDM Intelijen Daerah: Anggota FKDM di tingkat kecamatan atau nagari seringkali memiliki keterbatasan kapasitas formal dalam melakukan telaahan informasi intelijen (membedakan rumor/hoaks dengan fakta lapangan). Kecepatan Penyebaran Disinformasi di Media Sosial: Isu-isu lokal (seperti gesekan antarpemuda, batas wilayah nagari, atau isu SARA) sangat cepat membesar melalui platform digital sebelum sempat diredam oleh tim kewaspadaan dini di lapangan. Keterbatasan Anggaran Operasional Lapangan: Dinamika konflik di lapangan bersifat tidak terduga, sementara anggaran penanganan atau rapat koordinasi darurat seringkali terikat pada regulasi pencairan yang kaku.

3. Alternatif Solusi yang Diharapkan

Untuk memaksimalkan capaian indikator kinerja utama ini ke depan, berikut adalah beberapa alternatif solusi strategis yang dapat diimplementasikan:

A. Penguatan Aspek Regulasi dan Kelembagaan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PKS yang Lebih Spesifik: Menyusun dokumen RAD Penanganan Konflik Sosial yang memetakan kluster kerawanan secara mendetail per nagari/kecamatan.

Restrukturisasi dan Revitalisasi FKDM: Mengaktifkan kembali posko kewaspadaan dini hingga tingkat Nagari dengan melibatkan unsur pemuda (Parik Paga Nagari) untuk mempercepat aliran informasi horizontal.

B. Optimalisasi Pendekatan Adat (Kearifan Lokal)

Standardisasi Mediasi Berbasis Adat Sabiduak Sapadayung: Mengintegrasikan proses mediasi formal pemerintah dengan peradilan adat di tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk memutus mata rantai konflik agraria/ulayat sejak dini.

C. Digitalisasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Pengembangan Aplikasi / Kanal Pengaduan Cepat Kesbangpol: Membangun sistem pelaporan berbasis digital (misalnya grup koordinasi terenkripsi atau dashboard laporan) yang memungkinkan agen FKDM mengirimkan Laporan Informasi (LI) kilat secara berjenjang dari lapangan langsung ke me berjenjang dari lapangan langsung ke meja pengambil kebijakan.

D. Peningkatan Kapasitas SDM

Bimtek Teknis Analisis Informasi bagi Aparatur dan Pengurus Forum: Menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai metode deteksi dini, social mapping, serta teknik mediasi konflik bagi Kasi Trantib Kecamatan, perangkat Nagari, dan anggota FKDM.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Table 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
h)

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketahanan Idiologi Ketahanan Nasional dan Kualitas Kehidupan Demokrasi	Persentase Potensi Konflik Kewaspadaan Dini yang tertangani	100%	99.17%	0,83%

Efisiensi capaian kinerja = $100\% - 100\% = 0.00\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 99.17\% = 0.83\%$

Total Efisiensi = $0.00\% + 0.83\% = 0.83\%$

Dilihat dari tabel diatas Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 0.83% dan efisiensi kinerja sebesar 0%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 0.83%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator kinerja Kurang Efisien dalam indicator ini

f. Analis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Program ini hanya terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (dua) sub kegiatan, yaitu :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub kegiatan ini dianggarkan Rp14.672.000,- terealisasi Rp14.550.000.00,- atau 99.17% dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan Informasi terhadap Upaya Peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah

Foto yang mendukung Indikator yang mendukung Kegiatan



	Sasaran Kedua : Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Organisasi Masyarakat Indikator : Persentase Pembinaan Ormas dan LSM
---	--

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Pembinaan Ormas dan LSM	91%	91%	100%	Berhasil

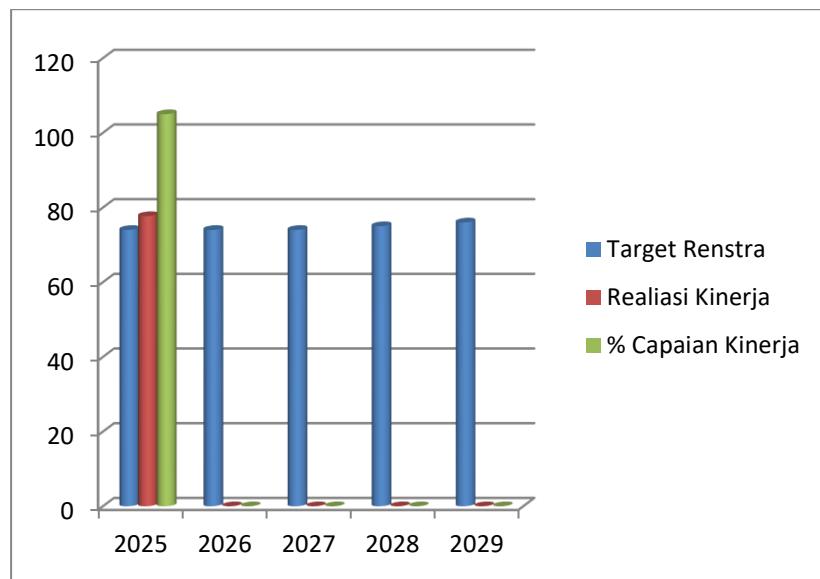
b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.23

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025
Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Pembinaan Ormas dan LSM	Tahun	-	-	-	91%	91%	100%	Berhasil

c. **Perbandingan Realisasi Capaian IKU dalam Renstra 2025-2030 dengan Target Jangka Menengah**



	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra	91	93	94	95	96
Realiasi Kinerja	91	0	0	0	0
% Capaian Kinerja	100	0	0	0	0

Dari tabel dan bagan di atas dapat kami jelaskan bahwa perbandingan untuk tahun sebelum belum bisa kami tampilkan perbandingan karena indikator baru di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

d. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja dan Hambatan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.**

Indikator "Persentase Pembinaan Ormas/LSM" merupakan salah satu indikator kinerja kunci (IKK) yang biasanya diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kabupaten Padang Pariaman. Keberhasilan indikator ini sangat penting untuk memastikan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beroperasi sesuai regulasi (UU No. 16 Tahun 2017), serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berikut adalah analisis komprehensif mengenai program penunjang, hambatan, serta alternatif solusi untuk indikator tersebut:

1. Program dan Kegiatan Menunjang Keberhasilan Kineja

Untuk mencapai target persentase pembinaan yang optimal, beberapa program dan kegiatan strategis yang perlu dan telah dilaksanakan meliputi :

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Sosialisasi UU Ormas dan Regulasi Terkait: Memberikan pemahaman berkala mengenai hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Ormas/LSM. Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara: Melibatkan pengurus Ormas/LSM dalam forum dialog bela negara untuk menjaga situasi kondusif dan mencegah radikalisme di Padang Pariaman.

Program Peningkatan Peran Ormas/LSM dalam Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Organisasi: Pelatihan tata kelola administrasi, penyusunan laporan keuangan, dan akuntabilitas internal organisasi agar Ormas/LSM menjadi lembaga yang profesional.

Forum Komunikasi Bersama (FKB) Pemerintah dan Ormas/LSM: Rapat koordinasi (Rakor) berkala atau Coffee Morning antara Bupati/Kesbangpol dengan pimpinan ormas untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan visi pembangunan daerah (misalnya mendukung sektor pariwisata atau pengentasan kemiskinan). Program Penataan Administrasi dan Kelembagaan (Verifikasi & Validasi) Fasilitasi Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) / Pencatatan Keberadaan Ormas: Menjemput bola atau mempermudah proses pelaporan keberadaan Ormas/LSM yang berbasis di wilayah Padang Pariaman (termasuk yang berbadan hukum Kemenkumham). Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Lapangan: Kunjungan lapangan langsung ke sekretariat Ormas/LSM guna memastikan keaktifan kepengurusan dan kesesuaian kegiatan dengan AD/ART mereka.

2. Hambatan Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat beberapa kendala yang sering memicu tidak tercapainya target 100% pembinaan atau menurunnya kualitas output pembinaan:

Hambatan Administratif dan Kelembagaan Ormas Sekretariat dan Kepengurusan yang Berubah-ubah: Banyak Ormas/LSM di Padang Pariaman yang tidak melaporkan perubahan domisili sekretariat atau restrukturisasi pengurus, sehingga menyulitkan Kesbangpol saat melakukan pemanggilan pembinaan atau monitoring. Rendahnya Kepatuhan Pelaporan: Masih banyak organisasi yang enggan atau lupa mengirimkan laporan berkala pelaksanaan kegiatan mereka setiap semester kepada Pemerintah Daerah.

Hambatan Finansial dan Sumber Daya Mandiri

Keterbatasan Anggaran Daerah (APBD): Alokasi dana di Badan Kesbangpol untuk mengundang seluruh Ormas/LSM dalam kegiatan tatap muka (seperti bimtek/sosialisasi) sering kali terbatas, sehingga pembinaan belum merata ke seluruh organisasi terdaftar.

Ketergantungan Ormas pada Hibah/Bansos: Banyak LSM/Ormas yang hanya aktif ketika ada stimulus bantuan dana hibah dari Pemda, dan menjadi vakum saat bantuan tersebut tidak ada.

Hambatan Geografis dan Komunikasi

Penyebaran Wilayah: Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 kecamatan dengan kontur geografis yang cukup luas. Akses mobilitas untuk monitoring ke ormas-ormas di tingkat nagari (desa) atau kecamatan pedalaman membutuhkan waktu dan akomodasi ekstra.

3. Alternatif Solusi

Untuk mengatasi hambatan di atas dan memastikan capaian indikator melampaui target, berikut adalah langkah alternatif yang direkomendasikan :
Digitalisasi Database dan Layanan (E-Ormas)

Membangun aplikasi atau sistem informasi berbasis web (Si-Ormas Padang Pariaman). Sistem ini berguna untuk pendaftaran online, pembaruan mandiri data pengurus/al amat sekretariat oleh ormas, serta sarana unggah laporan kegiatan berkala secara digital. Ini memangkas hambatan geografis dan jarak.

Penerapan Strategi Pembinaan Berbasis Klaster (Tematik)

Pembinaan tidak harus mengumpulkan semua ormas secara massal. Kesbangpol dapat membagi ormas ke dalam klaster khusus (misalnya: Klaster Keagamaan, Klaster Pemuda/Olahraga, Klaster Lingkungan Hidup/LSM). Pembinaan dilakukan secara fokus bekerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait (seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Disparpora), sehingga anggaran bisa sharing antardinas.

Program "Kesbangpol Menyapa" (Jemput Bola)

Melakukan pembinaan keliling (roadshow) ke tingkat kecamatan dengan memanfaatkan fasilitas kantor camat guna mengumpulkan ormas/LSM lokal di wilayah tersebut. Langkah ini jauh lebih efisien secara anggaran dan waktu dibanding memobilisasi pengurus ormas ke ibu kota kabupaten (Parit Malintang).

Reward dan Partnership Pemberdayaan

Memberikan penghargaan (Ormas Award) bagi organisasi yang paling tertib administrasi dan paling aktif berkontribusi positif bagi masyarakat Padang Pariaman.

Melibatkan Ormas/LSM secara aktif sebagai pelaksana swakelola tipe III (kemitraan dengan pemerintah) dalam program-program kemasyarakatan agar mereka dapat mandiri dan berkembang tanpa bergantung penuh pada skema dana hibah murni.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Table 3.24.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
i)

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Organisasi Masyarakat	Persentase Pembinaan Ormas dan LSM	100%	83.36%	16.64%

Efisiensi capaian kinerja = $100\% - 100\% = 0.00\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 83.36\% = 16.64\%$

Total Efisiensi = $0.00\% + 16.64\% = 16.64\%$

Dilihat dari tabel diatas Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 16.64% dan efisiensi kinerja sebesar 0%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 16.64%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator kinerja Kurang Efisien dalam indikator ini

- f. **Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :**

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp6.670.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut terrealisasikan sebesar Rp5.560.300,00 atau 83.37%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran sebesar Rp6.670.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.560.000,00 atau 83.36%. Kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- **Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di Daerah**

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	1	1	tahun	6,670,000.00	5,560,300.00	83.36
a.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di Daerah	1	1	Tahun	6,670,000.00	5,560,300.00	83.36
Jumlah					6,670,000	5,560,300	83.36



Sasaran ketiga : Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah

Indikator : Nilai Akip Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2024. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa

b. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.25
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Kantor

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	% capaian	
Nilai Akip Perangkat Daerah	77.70	77.70	100	Berhasil

Untuk target pada Indikator Kinerja Hasil Penilaian SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun ini adalah 100% dimana Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kantor Kaesatuan Bangsa dan Poltik mendapat nilai BB, realisasi dari indikator tersebut adalah sama 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator ini yang sama capaian 100%.

c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.26

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan Tahun 2025
Penanganan Konflik Sosial di Daerah

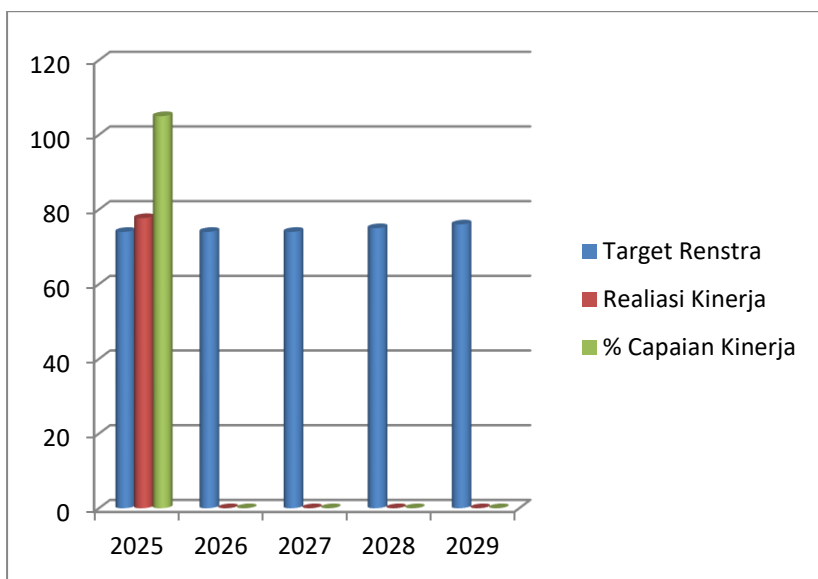
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
Hasil Penilaian AKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahun	BB	BB	100%	77.70	77.70	100%	Sangat Berhasil

Di lihat dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa indikator kinerja Hasil Penilaian SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 dan tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan 100% (BB) dengan interpretasi sangat berhasil. Hal ini didukung oleh kegiatan kegiatan yang di laksanakan oleh Pelaksanaan Tugas Kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini menunjukkan keseriusan Kantor Kesbang untuk meningkatkan Kinerja Kantor dan dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara rekan rekan kerja Kantor Kesbang.

d. Perbandingan Realisasi Capaian dengan Target Jangka Menengah dan Realisasi Capaian Kinerja dengan Renstra 2025-2029 dengan taret jangka menengah

Pada tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa indikator kinerja Hasil Penilaian SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditindaklanjuti tahun 2024 dan tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan 100% dengan interpretasi sangat berhasil. Hal ini didukung oleh Tim Sakip Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meujudkan taget yang telah di tentukan.

Dibawah ini adalah Perbandingan target pada Renstra 2025-2029 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra	77.70	78.00	78.50	79.00	79.50
Realiasi Kinerja	77.70	0	0	0	0
% Capaian Kinerja	100	0	0	0	0

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja dan Hambatan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Beberapa capaian positif yang biasanya menjadi pendongkrak nilai komponen AKIP (Perencanaan, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja) meliputi:

1. Cascading (Penyelarasan) Kinerja yang Jelas: Target kinerja Kepala Badan Kesbangpol telah di-cascade dengan baik hingga ke tingkat Kepala Bidang (Eselon III), Pengawas/Ketua Tim, dan Pelaksana melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. Terjaganya Kondusivitas Wilayah: Keberhasilan memitigasi potensi gesekan sosial (misalnya terkait pengadaan tanah proyek strategis nasional atau pasca-pemilu/pilkada) sehingga Indeks Kondusivitas Daerah tetap berkategori tinggi.

3. Ketepatan Pelaporan Timdu: Pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial yang tepat waktu dan berjenjang ke Kementerian Dalam Negeri, yang berkontribusi positif pada penilaian akuntabilitas output.
4. Pemanfaatan Aplikasi Kinerja: Pengisian data capaian kinerja yang mulai terintegrasi secara digital, mempermudah monitoring berkala (triwulanan/semesteran)..

Alternatif Solusi yang Diharapkan

Untuk menaikkan bobot penilaian pada setiap komponen AKIP (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja), berikut alternatif solusi strategis yang dapat diterapkan:

Komponen AKIP Rekomendasi Solusi / Aksi Nyata

Perencanaan Kinerja Redefinisi Indikator (IKU): Mengubah formulasi indikator agar lebih berorientasi outcome. Misalnya, dari "Jumlah rapat koordinasi Intelijen" menjadi "Persentase potensi konflik yang berhasil diredam sebelum eskalasi".

1. **Pengukuran Kinerja.** Digitalisasi Pengukuran Real-Time: Membangun dashboard kendali kinerja internal yang memetakan capaian fisik dan serapan anggaran secara bulanan, agar deviasi target langsung terlihat.
2. **Evaluasi Internal.** Reformasi Rapat Evaluasi: Mengubah agenda rapat pleno bulanan/triwulanan dari sekadar membaca laporan realisasi anggaran menjadi forum bedah hambatan capaian target IKU secara kritis.
3. **Pemanfaatan Data.** Sinergi Instansi & Mitra: Memanfaatkan Local Wisdom (Tokoh Adat/Masyarakat) dan berkolaborasi dengan akademisi lokal untuk membuat instrumen survei indeks kinerja yang objektif dan diakui secara metodologi.
4. **Kapasitas SDM.** Asistensi Intensif (Coaching Clinic): Melakukan bimbingan teknis berkala khusus dari Tim Evaluator SAKIP Inspektorat Daerah/Kemenpan-RB untuk menyelaraskan pohon kinerja (performance tree) Kesbangpol.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Table 3.27
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
g.

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Kantor	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	90%	10%

Efisiensi capaian kinerja = $100\% - 100\% = 0.00\%$

Efisiensi penyerapan anggaran = $100\% - 90\% = 10\%$

Total Efisiensi = $0.00\% + 10\% = 10\%$

Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 10% dan efisiensi kinerja sebesar 0%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 10%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian.

F. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	1	1	Tahun	22,950,000.00	22,382,843.00	97.53
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1	1	Tahun	10,810,000.00	10,423,558.00	96.43
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Tahun	12,140,000.00	11,959,285.00	98.51
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	Tahun	957,913,052.00	932,704,003.00	97.37
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	Tahun	895,873,052.00	871,174,003.00	97.24
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	Tahun	62,040,000.00	61,530,000.00	99.18
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	Tahun	88,630,000.00	62,345,366.00	70.34
a.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	Tahun	5,010,000.00	877,800.00	17.52
b.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Tahun	83,620,000.00	61,467,566.00	73.51
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1	1	Tahun	245,202,900.00	147,561,140.00	60.18
a.	Penyediaan Jasa Surat	1	1	Tahun	20,036,000.00	18,111,500.00	90.39
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Tahun	11,570,000.00	11,250,000.00	97.23
c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	Tahun	213,596,900.00	118,199,640.00	55.34
6	Pemeliharaan Barang Milik	1	1	Tahun	18,205,990.00	18,010,000.00	98.92
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak	1	1	Tahun	18,205,990.00	18,010,000.00	98.92
Jumlah					1,332,901,942.00	1,183,003,352.00	88.75

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota .

Anggaran **Rp1.332.901.942,00** dan realisasi **Rp. 1.183.003.352** atau sebesar **88.75%** dengan sisa dana sebesar **Rp. 149.818.590**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk operasional dan mempelancar adminitrasi kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran **Rp. 957.913.052,00** dan realisasi **Rp. 932.704.003,00** atau sebesar **97.37%** dengan sisa dana sebesar **Rp. 25.209.049,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhi pelayanan Pemerintah daerah nilai saki pemerintah daerah hasil evaluasi inspektorat persentase temuan BPK yang di tidaklanjuti dengan hasil Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah

2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daaerah.

Anggaran **Rp.22.950.000,00** dan realisasi **Rp. 22.382.843,00** atau sebesar **97.53%** dengan sisa dana sebesar **Rp. 567.157,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar meningkatnya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Anggaran **Rp. 88.630.000,00** dan realisasi **Rp. 62.345.366,00** atau sebesar **70.34%** dengan sisa dana sebesar **Rp.150.975.366,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi umum perangkat daerah

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran **Rp. 245.202.900,00** dan realisasi **Rp. 147.561.140,00** atau sebesar **60.18%** dengan sisa dana sebesar **Rp. 97.641.760,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi umum perangkat daerah

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran **Rp. 18.205.990,00** dan realisasi **Rp. 18.010.000,00** atau sebesar **98.92%** dengan sisa dana sebesar **Rp. 195.490,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya administrasi umum perangkat daerah

Tabel 3.28

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah dalam
Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET JANGKA MENENGAH						REALISASI JANGKA MENENGAH						% REALISASI DI TAHUN INI (2021)/ TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH (2025)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan ya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentas potensi konflik sosial Daerah	%	80	83	85	90	95	100	100	100	100	100	100	-	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Kantor	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa	%	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	-	100

Tabel 3.29

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah dalam
Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET JANGKA MENENGAH					REALISASI JANGKA MENENGAH					% REALISASI DI TAHUN INI (2025)/ TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH (2025)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Ketahanan Nasional, dan Kualitas Kehidupan Demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	85	87	88	90	92	85	-	-	-	-	100
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	85	87	88	90	92	85	-	-	-	-	100
	Persentase penurunan jumlah konflik	%	80	78	75	73	72	80	-	-	-	-	100
	Persentase potensi konflik kewaspadaan dini yang tertangani	%	92	94	95	97	98	92	-	-	-	-	100
Meningkatnya Kapasitas dan kemandirian Organisasi Masyarakat	Persentase Pembinaan ormas/LSM	%	91	93	94	95	96	91	-	-	-	-	100
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	%	77,70	78,00	78,50	79,00	79,50	77.70	-	-	-	-	100

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Tabel 3.30
Realisasi Kegiatan Anggaran Tahun 2025

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	958,913,052	932,704,003	26,209,049	97.27	
1	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	896,873,052	871,174,003	25,699,049	97.13	Tersedianya Gaji dan Tunjangan
2	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62,040,000	61,530,000	510,000	99.18	Meningkatnya Kinerja Keuangan yang akuntabel selama 12 bulan
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	22,950,000	22,769,285	180,715	99.21	
3	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,810,000	10,810,000	-	100.00	Tersedianya Renja, renstra, RKA, DPA
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,140,000	11,959,285	180,715	98.51	Tersedianya laporan LAKIP, LPPD, Renstra, RKA, DPA, Laporan Keuangan Semester pada APBD
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	88,630,000	62,345,366	26,284,634	70.34	
4	a. Fasilitas Kunjungan Tamu	5,010,000	877,800	4,132,200	17.52	terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu selama 12 bulan
5	b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	83,620,000	61,467,566	22,152,434	73.51	Terlaksananya rapat Koordinasi selama 12 bulan
JUMLAH PINDAH KE HALAMAN 02		1,070,493,052	1,017,818,654	52,674,398		

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PINDAHAN DARI HALAMAN 01	1.1070.493.052	1.017.818.654	52.674.198		
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>245.202.900</i>	<i>147.561.140</i>	<i>97.641.760</i>	60.18	
6	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.036.000	18.111.500	1.924.500	90.39	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan
7	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.570.000	11.250.000	320.000	97.23	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin/berkala selama 12 bulan
8	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.596.900	118.199.640	95.397.260	55.34	Meningkatnya kinerja swakelola sebanyak 9 (sembilan) orang selama 12 bulan
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>18.205.990</i>	<i>18.010.000</i>	<i>195.990</i>	<i>98.92</i>	
9	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>18.205.990.</i>	<i>18.010.000</i>	<i>195.990</i>	<i>98.92</i>	Terpenuhinya jasa service, belanja penggantian suku cadang, pajak, BBM dan Pelumas kendaraan dinas selama 12 bulan
II	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	667.526.000	594.178.458	73.347.542	89.01	
10	Pembentukan Paskibraka	667.526.000	594.178.458	73.347.542	89.01	Terlaksananya pembentukan dan kegiatan paskibraka dengan baik
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.015.380.000	1.014.580.300	799.700	99.02	

11	a.Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	999.360.000	999.360.000	0	100	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bantuan Dana Papol untuk Tahun 2022 sebanyak 10 Papol dan terealisasi sebanyak 8 Papol
12	b.Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.080.000	2.585.300	497.700	83.94	
13	c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12.940.000	12.635.000	305.000	97.64	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
IV	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6.670.000	5.560.300	1.109.700	83.36	
14	a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di Daerah	6.670.000	5.560.300	1.109.700	83.36	Terdatanya keberadaan Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	9.350.000	5.295.000	4.055.000		
15	a.Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6.260.000	2.605.000	3.655.000		Terlaksananya peringatan hari HANI

16	b.Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	3.090.000	2.690.000	400.000	87.06	
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	335.428.000	252.188.600	83.239.400	75.18	
17	a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.672.000	14.550.000	122.000	99.17	Gangguan Konflik sosial yang dapat diredam selama 12 bulan
	b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	320.756.000	237.638.500	83.117.500	74.09	Terlaksnaanya FGD Forkopimda tahun 2025
JUMLAH		3.367.255.942	3.054.805.910	312.450.032	90.72	

4.1 KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2024 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2024 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

4.2 LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum melalui pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat dengan Fasiltasi Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan kegiatan Rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.

2. Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat, melalui pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika ,Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwaklan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
3. Meningkatnya kesadaran parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi, melalui pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik dengan kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika ,Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwaklan dan partai politik , pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
4. Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam, melalui pelaksanaan program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pelaksanaan program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas.
6. Menurunnya kasus narkoba di tengah masyarakat, melalui pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang

Pariaman, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman maupun kepada stakeholders yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan berkahnya dalam segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Parit Malintang, 09 Maret 2026

**Pt. KEPALA KANTOR KESBANG DAN
POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



LILIS MAIRIZAL, S.Sos., M.Si
NIP. 196906061993082001

LAMPIRAN :



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung
Gedung Kantor Bupati Padang Pariaman Lt. 3, email : *kesbangpol.padangpariaman@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 002/KEP/KESBANGPOL/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Kantor tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
21. Revisi Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.

KEDUA Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah.

KETIGA Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Kantor ini.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kode rekening sub kegiatan 8.01.01.2.01.07.

KELIMA

Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku tanggal

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA KESBANGPOL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Tembusan disampaikan kpd yth :

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Organisasi dan PAN
Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 002 /KEP/KESBANGPOL/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWA B
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketertiban umum / stabilitas keamanan	Persentase Penurunan Konflik Sosial Masyarakat	Jumlah Konflik yang terjadi : Jumlah Potensi Konflik x 100%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kantor

KEPALA KESBANGPOL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



JON EKA PUTRA, S.Sos., M.Si
NIP. 19680113-198902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

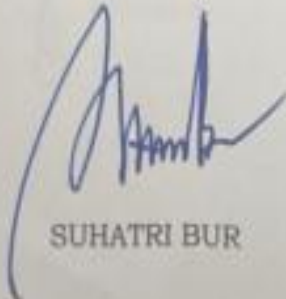
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parit Malintang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUHATRI BUR

Pihak Pertama,



JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si
Nip. 19680113 198902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Kantor	Hasil Penilaian Evaluasi SAUP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	80.01 (A)
2	Meningkatnya Ketertiban Umum / Stabilitas Keamanan	Persentase Penurunan Konflik Sosial Masyarakat	100%

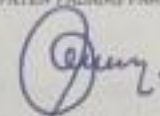
PROGRAM		ANGGARAN	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	1,523,037,074.00
2	Penguatan Ideologi Pancasila dan Konsider Kebangsaan	Rp	822,940,000.00
3	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik	Rp	1,058,945,900.00
4	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp	23,000,000.00
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp	41,042,000.00
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	410,142,000.00
JUNJIAN		Rp	3,879,706,974.00

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHARTO DUH

PART MALINTANG, 2 JANUARI 2025
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JON EKA PUTRA, S.Sos., M.Bi
NIP. 19680113 198902 1 001

REVIU BERJENJANG					
Kelas Tim		Dahis		Wanjib	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
30/1-25		30/1-25		30/1-25	

Paraf Verifikasi	
Ka. Dinas/Kantor	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

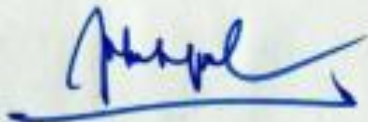
1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja sub bagian dan seksi-seksi pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Parit Malintang, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,



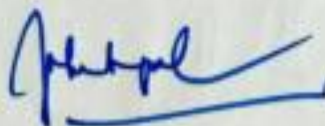
JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680113 198902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Ketahanan Nasional, dan Kualitas Kehidupan Demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	85%
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	85%
		Persentase penurunan jumlah konflik	80%
		Persentase potensi konflik kewaspadaan dini yang tertangani	92%
2	Meningkatnya Kapasitas dan kemandirian Organisasi Masyarakat	Persentase Pembinaan terhadap ormas/LSM	91%
3	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	74 (B)

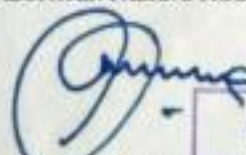
PROGRAM		ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1,332,901,942.00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Rp	667,526,000.00
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	1,015,380,000.00
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	6,670,000.00
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp	9,350,000.00
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	335,428,000.00
JUMLAH		Rp	3,367,255,942.00

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Parit Malintang 23 Oktober 2025
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JON EKA PUTRA, S.Sos., M.Si
NIP. 19680113 198902 1 001

Paraf Verifikasi

Ka. Kesbang dan Politik	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

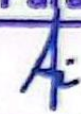
Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	